

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu *corporate governance* (CG) di Indonesia semakin mendapat perhatian khusus setelah terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997-1998. Survei PricewaterhouseCoopers atas investor internasional pada tahun 2002 menunjukkan bahwa Indonesia pada saat itu menduduki posisi terbawah dalam hal audit dan kepatuhan, akuntabilitas terhadap pemegang saham, standar pengungkapan dan transparansi serta peranan direksi, untuk membandingkan kerangka *governance* Indonesia dengan negara lain pada satu wilayah (*Forum for Corporate Government in Indonesia*, 2008). Untuk memperbaiki hal tersebut, sejak tahun 1999 telah dibentuk Komite Nasional Kebijakan Governance dan mengeluarkan Pedoman *Good Corporate Governance* yang telah mengalami perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Penerapan *Corporate Governance* diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (dalam Irawan dan Aria, 2012).

Keberhasilan penerapan *corporate governance* akan sangat bergantung pada kuatnya hukum sekuritas dan korporasi, standar akuntansi yang baik, peraturan yang kuat, sistem peradilan yang efisien, dan tekad yang kuat untuk melawan korupsi yang diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan di

Asia (Barton *et al.*, 2004)dalam Irawan dan Aria (2012). Manajemen memegang peranan penting dalam memilih strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kekayaan (Irawan dan Aria, 2012). Manajemen berkewajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan efisiensi pembayaran pajak. Manajemen dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen pajak merupakan upaya perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian (Meilinda dan Nur,2013).

Karakteristik *corporate governance* sebuah perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak (Bernad, 2011). Karakteristik *corporate governance* yang dimaksud adalah jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan jumlah kompensasi dewan komisaris serta direksi dan komite audit. Keempat variabel ini akan dijadikan penentu apakah *corporate governance* perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan tersebut.

Menurut Irawan dan Aria (2012), penerapan *corporate governance* diharapkan mampu mengatasi masalah agensi yang dialami oleh perusahaan. Masalah agensi ini timbul karena asimetri informasi akibat pemisahan kepemilikan dan manajemen perusahaan. Hal ini dapat memberikan celah bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik (*moral hazard*). Banyak upaya yang telah dilakukan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus

dibayarkan ke negara, salah satunya adalah dengan menerapkan manajemen pajak (Bernad, 2011).

Minnick dan Noga (2010) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh kompensasi manajemen terhadap manajemen pajak, yang menemukan pengaruh paket kompensasi saham mendorong manajer melakukan manajemen pajak untuk efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa manajemen pajak dapat menambah laba bersih perusahaan dan memberi manfaat kepada pemegang saham karena berkaitan positif terhadap tingginya tingkat pengembalian investasi mereka. Rego dan Wilson (2008) menemukan pengaruh insentif kompensasi top manajemen terhadap manajemen pajak, khususnya pengaruh yang positif antara kompensasi CEO dan CFO terhadap agresivitas pelaporan pajak (Fahreza, 2014).

Suandy (2008) dalam Meilinda dan Nur (2013) menyebutkan bahwa asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on investment*). Status perusahaan yang *go public* atau belum akan mempengaruhi kebijakan pembagian dividen. Perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum *go public*. Agar harga pasar sahamnya meningkat, manajer perusahaan *go public* akan berusaha tampil sebaik mungkin, sukses, dan membagi dividen yang besar (Damayanti, 2009). Demikian juga dengan pembayaran pajaknya akan diusahakan sebaik mungkin. Namun apa pun asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan

kembali oleh perusahaan. Oleh karena itu, investasi dijadikan salah satu strategi dalam penghematan pajak (Minnick dan Noga, 2010).

Posisi dewan komisaris sebagai wakil atas pemegang saham, maka dewan komisaris akan mengutamakan kepentingan pemegang saham, yaitu memaksimalkan kekayaan perusahaan yang nilainya dipengaruhi oleh pajak (Sabli dan Noor, 2012). Dewan komisaris erat hubungannya dengan komisaris independen. FCGI (2004) menyatakan komisaris Independen berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik transparansi, *disclosure*, kemandirian, akuntabilitas dan praktek keadilan menurut ketentuan yang berlaku di suatu sistem perekonomian (negara), serta merencanakan strategi perusahaan secara periodik. Adapun kompensasi bertujuan untuk menyelaraskan tujuan pengelola perusahaan dengan tujuan pemilik perusahaan, serta memotivasi pengelola dan penasihat perusahaan (Bernad, 2011). Dalam hal ini yang dimaksud pemilik perusahaan adalah dewan komisaris dan pengelola perusahaan adalah dewan direksi. Hal ini dilakukan agar memberikan usaha yang terbaik demi mencapai keuntungan yang maksimal.

Literatur mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen pajak telah ditemukan. Salah satunya oleh Minnick dan Noga (2010). Penelitian tersebut menemukan bahwa paket kompensasi berbasis saham, sebagai salah satu komponen *corporate governance*, mendorong manajer melakukan manajemen pajak untuk efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Hal tersebut dapat menambah *value* dari perusahaan dan memberi manfaat kepada pemegang saham karena

berkaitan positif terhadap tingginya tingkat pengembalian kepada mereka. Selain itu, Armstrong et al. (2012) melakukan penelitian mengenai hubungan kompensasi yang diterima oleh eksekutif perusahaan, khususnya atas kompensasi yang diterima oleh direktur pajak, terhadap *tax planning* perusahaan. Dalam penelitian tersebut, mereka membuktikan adanya hubungan negatif yang kuat antara kompensasi yang diterima direktur pajak perusahaan dengan *tax planning* melalui GAAP *effective tax rate*. Hal ini menarik untuk diteliti karena masalah ini merupakan isu baru dan pajak merupakan hal yang sangat kompleks peraturannya (Meilinda dan Nur, 2013).

Dari penelitian sebelumnya, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian secara lebih lanjut mengenai bagaimana *corporate governance* perusahaan mempengaruhi manajemen pajak perusahaan yang diukur dengan tarif pajak efektif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen pajak?
2. Apakah persentase komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak?

3. Apakah kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen pajak?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap manajemen pajak perusahaan.
2. Untuk menganalisis pengaruh persentase jumlah komisaris independen terhadap manajemen pajak perusahaan.
3. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi terhadap manajemen pajak perusahaan.
4. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap manajemen pajak.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademisi dan peneliti, dapat dijadikan bukti empiris dan masukan literatur ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya perpajakan dan *corporate governance*, serta dapat menambah wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam yang berkaitan dengan manajemen pajak.

2. Bagi perusahaan, dapat dijadikan sebagai panduan untuk manajemen pajak perusahaan, yang diterapkan sesuai dengan karakteristik *corporate governance* perusahaan bersangkutan.
3. Bagi Peneliti, Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih mengetahui Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang dilakukannya penelitian, perumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab ini akan memberikan gambaran umum arah penelitian yang akan memandu pembaca dalam memahami permasalahan yang sesungguhnya dibahas dalam penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan memaparkan konsep dan teori yang melandasi seluruh permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Bab ini juga akan menjelaskan hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini berdasarkan landasan teori, standar, dan penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan bagaimana pembentukan populasi dan sampel penelitian, definisi variabel yang diteliti, metode pengumpulan data, model penelitian, serta prosedur pengolahan data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil dan analisis berisi deskripsi objek penelitian, analisis data yang dikaitkan dengan analisis statistik deskriptif dan analisis model regresi, serta interpretasi hasil sesuai dengan teknik analisis yang digunakan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan berisi penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan interpretasi hasil, keterbatasan penelitian yang menguraikan tentang kelemahan dan kekurangan yang ditemukan setelah dilakukan analisis dan interpretasi hasil serta saran bagi peneliti selanjutnya.